Strategi Sekolah dalam Memperluas Kesempatan Belajar bagi Peserta Didik di SMAN 14 Makassar

Rosvita Yanti[1]*; Fadia Assyifa[2]; Liza Dwi Eftiza Khairunniza[3]; Supriadi Torro[4]
Universitas Negeri Makassar[1234]
Email: Fadiasyifaa82@gmail.com[1]; Lizadwi.eftiza@unm.ac.id[2]; supriaditorro@unm.ac.id[3]

*E-mail korespondensi: rosvitayanti603@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Peserta didik datang dari keluarga dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Karena itu, pemerataan kesempatan belajar tidak cukup diukur dari banyaknya anak yang berhasil diterima di sekolah. Biaya transportasi, jarak tempat tinggal, kesulitan belajar, dan keterbatasan tertentu dapat membuat seorang anak sulit bertahan dalam pendidikan. Tujuan: Artikel ini menggambarkan strategi sekolah dalam memperluas kesempatan belajar peserta didik berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMAN 14 Makassar. Metode: Penelitian memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan lewat wawancara dan studi dokumen, lalu dikelompokkan ke dalam tema dan diuraikan secara naratif. Hasil: Menurut informan, sekolah membuka akses melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan jalur khusus. Setelah murid diterima, sekolah menyalurkan beasiswa dengan menelusuri kondisi keluarga terlebih dahulu, mendampingi murid yang kesulitan belajar sambil membenahi cara mengajar guru, menyamakan fasilitas, serta menggandeng perguruan tinggi, kepolisian, lembaga lain, dan bimbingan belajar. Kesimpulan: Strategi sekolah tidak berhenti pada penerimaan murid. Sekolah juga berusaha menjaga agar mereka tetap hadir dan melanjutkan pendidikan lewat bantuan, pendampingan, fasilitas, dan kerja sama dengan pihak luar. Temuan ini mencerminkan sudut pandang pimpinan sekolah dan belum menjadi evaluasi dampak program.

***Kata kunci*:** Kemitraan Sekolah; Kesempatan Belajar; Pemerataan Pendidikan; Pendampingan Peserta Didik; SPMB

ABSTRACT

Background: Students come from families with different social and economic circumstances, so equity in learning opportunities cannot be judged only by how many children are admitted to school. Transport costs, residential distance, learning difficulties, and other limitations may keep a child from staying in education. Objective: This article describes the strategies a school uses to widen learning opportunities, drawing on an interview with the Vice Principal of SMAN 14 Makassar. Method: A descriptive qualitative approach was used. Data came from an interview and document study, and were grouped into themes and presented narratively. Results: According to the informant, the school opens access through the New Student Admission System (SPMB), which includes zoning, affirmation, achievement, and special tracks. After admission, the school channels scholarships after first checking each family's situation, supports students who struggle while also improving teachers' methods, equalizes facilities, and partners with universities, the police, other institutions, and tutoring providers. Conclusion: The school's strategies do not stop at admission. They also aim to keep students attending and continuing their education through aid, mentoring, facilities, and external partnerships. The findings reflect the school leader's perspective and are not an impact evaluation.
Keywords: *Educational Equity; Learning Opportunities; School Partnerships; SPMB; Student Support*

PENDAHULUAN

Melalui pendidikan, seseorang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh sebab itu, pemerataan pendidikan menjadi tujuan penting. Kesempatan pendidikan yang setara mencakup lebih dari ketersediaan gedung sekolah, yakni kemampuan peserta didik untuk mengakses dan terus mengikuti proses pendidikan. Pemerataan memiliki beberapa dimensi, mulai dari keterjangkauan layanan hingga keadilan perlakuan dan mutu pengalaman belajar yang diterima. Analisis indikator partisipasi pendidikan Indonesia periode 1994–2018 menggunakan keterlibatan peserta didik sebagai salah satu tolok ukur capaian pemerataan (Fatah et al., 2021).

Persoalan ini juga muncul dalam konteks Sulawesi Selatan. Said dan Torro (2020) meneliti kontribusi Kelas Perahu dalam mengurangi angka putus sekolah di Pulau Salemo, Kabupaten Pangkep. Kajian tersebut menunjukkan pentingnya layanan khusus untuk menjawab hambatan akses di wilayah kepulauan. Dari sudut pandang inklusi, hambatan akses perlu diidentifikasi secara sistematis serta ditangani melalui keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya sekolah (Ainscow, 2020).

Dalam kondisi tersebut, sekolah menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan sehari-hari; perannya tidak berhenti ketika peserta didik diterima. Bantuan ekonomi, pendampingan, penyamaan fasilitas, serta kemitraan merupakan bagian dari upaya mengurangi hambatan selama masa pendidikan. Hubungan antarpihak berpotensi memperkuat dukungan sosial bagi peserta didik. Ulvi (2025) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dapat meningkatkan jangkauan calon peserta didik melalui sosialisasi, promosi daring, dan penguatan program unggulan. Dengan demikian, pemerataan kesempatan belajar membutuhkan strategi untuk membuka akses sekaligus mendampingi peserta didik setelah diterima.

Penelitian terdahulu kerap menempatkan sistem zonasi sebagai fokus analisis kebijakan. Kajian di SMAN 1 dan 2 Kota Blitar menemukan bahwa perbedaan kualitas sumber daya antarsekolah, koordinasi pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi memengaruhi pelaksanaan kebijakan (Harianti, 2024). Ulvi (2025) mengulas strategi penerimaan peserta didik di MAN 1 Kepahiang, antara lain sosialisasi antarsekolah, promosi daring, serta program unggulan. Sementara itu, Devitasari et al. (2025) membahas strategi guru dalam memfasilitasi peserta didik dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam melalui bimbingan tambahan, teknologi, dan pembelajaran kolaboratif. Kajian-kajian tersebut menyediakan dasar untuk melihat keterkaitan antara akses penerimaan dan layanan pembelajaran. Namun, strategi terpadu dari sudut pandang pimpinan sekolah mengenai bantuan ekonomi, pendampingan belajar, pemerataan fasilitas, serta kemitraan setelah penerimaan masih perlu dijelaskan.

Untuk kepentingan analisis, kesempatan belajar dapat dipahami melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah terbukanya peluang memasuki sekolah; tahap kedua adalah tersedianya kondisi yang memungkinkan peserta didik mengikuti pembelajaran secara layak; sedangkan tahap ketiga adalah keberlanjutan keikutsertaan sampai pendidikan dapat diselesaikan. Pembagian ini digunakan sebagai kerangka pembacaan hasil wawancara, bukan sebagai indikator yang telah diukur secara kuantitatif. Perbedaan antartahap penting karena sebuah kebijakan penerimaan dapat memperbesar jumlah murid yang masuk tanpa dengan sendirinya menghilangkan hambatan selama mereka bersekolah.

Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMAN 14 Makassar memberi gambaran bahwa sekolah ini melayani murid dari berbagai latar belakang melalui SPMB, bantuan bagi murid kurang mampu, dan pendampingan bagi murid yang kesulitan belajar. Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan strategi sekolah dalam memperluas kesempatan belajar peserta didik, mencakup kebijakan penerimaan, dukungan ekonomi, pendampingan pembelajaran, pemerataan sumber daya, kerja sama dengan pihak lain, kendala pemerataan, serta evaluasi dan keberlanjutan strategi. Secara konseptual, artikel ini memperkaya pembahasan pemerataan dengan dimensi keberlanjutan, yaitu upaya mempertahankan murid setelah diterima; secara praktis, uraiannya dapat menjadi bahan refleksi bagi sekolah lain dan dinas pendidikan. Cakupan dibatasi pada satu sekolah menengah atas negeri di Makassar, sehingga hasilnya merupakan gambaran kontekstual, bukan generalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami strategi sekolah dalam memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik. Fokus penelitian adalah SMAN 14 Makassar. Analisis dilakukan melalui penafsiran keterangan informan dan dokumen pendukung, tanpa pengujian statistik.

Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 14 Makassar (NPSN 40311948) di Jl. Bajiminasa No. 9, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekolah negeri ini telah beroperasi sejak 1991 dan memperoleh akreditasi A pada 2024. Profil Sekolah Kita untuk semester 2025/2026-1 memuat informasi penerapan Kurikulum Merdeka dengan sistem lima hari sekolah, 1.055 peserta didik (501 laki-laki dan 554 perempuan), 30 rombongan belajar, 62 guru, dan 32 ruang kelas (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, n.d.).

Unit analisis penelitian adalah strategi kelembagaan yang diterangkan oleh pimpinan sekolah. Pemilihan wakil kepala sekolah memungkinkan peneliti memperoleh gambaran mengenai kebijakan dan koordinasi

program dalam satu wawancara. Akan tetapi, informasi tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai representasi pengalaman seluruh guru, orang tua, ataupun peserta didik. Oleh karena itu, uraian hasil secara konsisten membedakan pernyataan informan, informasi dari profil sekolah, dan penafsiran peneliti terhadap keterkaitan keduanya.

Data diperoleh melalui wawancara langsung dan studi dokumen. Wawancara dilaksanakan pada 29 September 2026 dengan Wakil Kepala Sekolah SMAN 14 Makassar yang dipilih berdasarkan perannya dalam pengelolaan sekolah. Studi dokumen mencakup informasi mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), kajian terdahulu, profil sekolah, dan dokumentasi foto wawancara. Perubahan penamaan jalur zonasi menjadi domisili dalam kebijakan SPMB dibahas dengan merujuk informasi kebijakan yang tersedia (Attar, 2025).

Data dianalisis secara tematik dengan mengelompokkan keterangan informan ke dalam tema sesuai fokus penelitian, menguraikannya secara naratif, lalu menghubungkannya dengan literatur. Pemeriksaan keabsahan diupayakan melalui perbandingan antara hasil wawancara, dokumen, dan pustaka, sejalan dengan prinsip triangulasi (Carter et al., 2014) dan kriteria keterpercayaan analisis tematik (Nowell et al., 2017). Namun, karena data utama hanya berasal dari satu informan dan belum divalidasi menggunakan data administratif yang terperinci, hasil penelitian lebih tepat dipahami sebagai deskripsi strategi menurut perspektif pimpinan sekolah daripada evaluasi dampak program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelompokan tema diarahkan pada enam aspek yang muncul dalam uraian informan, yakni penerimaan, bantuan ekonomi, pendampingan belajar, fasilitas, kemitraan, serta evaluasi keberlanjutan. Setiap aspek dibahas dengan menempatkan bentuk tindakan dan hambatan sasaran dalam satu alur penjelasan. Perbandingan dengan literatur digunakan untuk mempertajam interpretasi, bukan untuk menggantikan bukti lapangan. Foto wawancara berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan pengumpulan data, bukan sebagai bukti langsung bahwa seluruh program telah dilaksanakan dengan cakupan atau hasil tertentu.

Kebijakan Penerimaan Murid Baru dan Perluasan Akses

Wakil Kepala Sekolah menjelaskan bahwa sekolah mengikuti program Dinas Pendidikan dalam penerimaan murid baru melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Menurut penuturan informan, jalur yang digunakan meliputi zonasi bagi calon murid yang tinggal di sekitar sekolah, afirmasi bagi keluarga kurang mampu, prestasi akademik maupun nonakademik, serta jalur khusus, termasuk bagi calon murid yang menghafal beberapa juz. Istilah "zonasi" dipertahankan saat melaporkan keterangan informan, sedangkan penamaan resmi pada kebijakan SPMB 2025 menggunakan jalur domisili (Attar, 2025). Jalur-jalur tersebut dimaksudkan untuk menjawab hambatan yang berbeda, seperti jarak, kondisi ekonomi, dan pengakuan prestasi. Namun, informan tidak menyampaikan kuota tiap jalur sehingga jangkauan jalur afirmasi terhadap calon murid paling membutuhkan belum dapat dinilai. Penamaan dan dasar jalur khusus juga memerlukan konfirmasi pada dokumen penerimaan sekolah.

Keberadaan beberapa jalur penerimaan menggambarkan upaya mengakomodasi kebutuhan calon peserta didik yang tidak seragam. Akan tetapi, kesetaraan aturan masuk dan pemerataan hasil tidak selalu identik. Untuk menilai keterjangkauan secara lebih kuat, dibutuhkan data jumlah pendaftar, daya tampung, penerimaan tiap jalur, dan karakteristik hambatan yang dialami calon peserta didik. Data tersebut tidak tersedia dalam bahan penelitian ini. Dengan demikian, wawancara lebih tepat dipandang sebagai penjelasan mengenai pilihan mekanisme yang digunakan sekolah, bukan sebagai bukti bahwa setiap kelompok peserta didik telah memperoleh peluang pendidikan yang sebanding. Informasi yang diperoleh memberikan gambaran mengenai berbagai upaya sekolah dalam memperluas akses pendidikan melalui kebijakan penerimaan, bantuan ekonomi, dan pendampingan pembelajaran. Namun, efektivitas mekanisme tersebut belum dapat dipastikan karena belum didukung oleh data yang menunjukkan tingkat keterjangkauan dan kebermanfaatannya bagi setiap kelompok peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana strategi yang diterapkan mampu mengurangi kesenjangan kesempatan belajar secara nyata dan berkelanjutan.



Gambar 1. Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMAN 14 Makassar

Dukungan Ekonomi dan Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran

Menurut informan, sekolah menyalurkan beasiswa bagi murid dari keluarga kurang mampu agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi alasan berhenti bersekolah. Hambatan yang paling nyata bukan uang sekolah, melainkan biaya transportasi bagi murid yang tempat tinggalnya jauh. Wali kelas menyampaikan informasi mengenai kondisi murid, kemudian guru bimbingan dan konseling (BK) atau pihak sekolah menelusuri kondisi keluarga sebelum bantuan disalurkan. Informan menyampaikan bahwa terdapat 359 siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Jika dibandingkan dengan 1.055 peserta didik pada profil sekolah, jumlah tersebut setara dengan sekitar 34% (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, n.d.). Temuan ini sejalan dengan perhatian Said dan Torro (2020) terhadap hambatan akses pendidikan. Penelusuran melalui wali kelas dan guru BK dapat membantu memperkecil risiko salah sasaran, tetapi kriteria tertulis dan pencatatan yang konsisten tetap diperlukan. Angka bantuan tersebut berasal dari keterangan yang dilaporkan dalam penelitian dan belum ditelusuri ulang melalui daftar penerima administratif.

Informasi mengenai 359 penerima KIP dan PIP penting sebagai gambaran besarnya kebutuhan dukungan ekonomi yang dilaporkan. Namun, proporsi sekitar 34% merupakan perbandingan deskriptif dengan jumlah peserta didik dalam profil sekolah dan belum dapat diartikan sebagai tingkat ketepatan sasaran bantuan. Interpretasi yang lebih kuat memerlukan kesesuaian periode pendataan, verifikasi bahwa penerima tidak terhitung ganda, serta informasi jumlah peserta didik yang memenuhi kriteria bantuan tetapi belum menerimanya. Selain itu, hambatan transportasi yang disebut informan memperlihatkan bahwa kebutuhan riil murid tidak selalu tercermin hanya dari status penerima program.

Alur informasi melalui wali kelas dan guru BK dapat dipahami sebagai pendekatan yang mengandalkan kedekatan sekolah dengan kondisi peserta didik. Kelebihannya terletak pada peluang mengenali persoalan yang tidak segera tampak dalam berkas administratif. Di sisi lain, keputusan yang sangat bergantung pada pengetahuan personal berisiko berbeda antarkelas apabila tidak disertai prosedur pencatatan bersama. Karena itu, dokumentasi pengusulan, pemeriksaan kebutuhan, dan tindak lanjut layak dipertimbangkan sebagai penguatan tata kelola, bukan sebagai tindakan yang sudah terbukti diterapkan secara seragam di sekolah.

Pendampingan Peserta Didik yang Mengalami Kesulitan Belajar

Informan menjelaskan bahwa kesulitan belajar tidak langsung dianggap sebagai kesalahan murid. Sekolah terlebih dahulu menelusuri kemungkinan penyebabnya, termasuk kemampuan peserta didik, metode mengajar yang kurang bervariasi, atau situasi di kelas. Apabila kendala berkaitan dengan metode pembelajaran, sekolah mengadakan lokakarya metode dan evaluasi pembelajaran; sementara itu, guru bersama guru BK melakukan pendekatan individual jika kendala terutama dialami peserta didik. Walaupun SMAN 14 Makassar bukan sekolah berstatus inklusi, informan menyampaikan bahwa guru didorong menyesuaikan tuntutan bagi satu atau dua murid yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini selaras dengan pandangan Ainscow (2020) bahwa prinsip inklusi dan ekuitas perlu dijalankan dalam keseluruhan sistem sekolah.

Pendampingan yang diterangkan informan bekerja pada dua tingkat. Pada tingkat individu, sekolah berupaya memahami kendala murid melalui komunikasi guru dan guru BK. Pada tingkat pembelajaran,

sekolah mengarahkan perhatian pada metode mengajar dengan menyelenggarakan lokakarya bagi guru. Pembacaan dua tingkat ini menempatkan kesulitan belajar sebagai persoalan yang dapat dipengaruhi interaksi antara kebutuhan murid dan lingkungan pembelajaran. Namun, penelitian belum memuat catatan perkembangan belajar, hasil evaluasi lokakarya, maupun tanggapan murid mengenai pendampingan, sehingga efektivitas kedua bentuk dukungan tersebut belum dapat dinilai.



Gambar 2. Dokumentasi proses wawancara mengenai pendampingan belajar

Penyamaan Fasilitas dan Kendala Pemerataan

Menurut informan, kendala yang sering dihadapi berkaitan dengan kondisi ekonomi dan keterbatasan fasilitas yang dimiliki sebagian peserta didik. Keadaan tersebut dapat mengganggu kehadiran maupun partisipasi dalam kegiatan sekolah. Setelah peserta didik diterima, sekolah berupaya menyediakan fasilitas secara setara untuk mengurangi kesenjangan di lingkungan belajar. Literatur menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan turut dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, sarana pendidikan, serta kebijakan pendukung di luar sekolah (Syakarofath et al., 2020). Dengan demikian, sekolah dapat mengupayakan fasilitas, bantuan, serta pendampingan, sedangkan keterbatasan ekonomi keluarga tetap memerlukan dukungan yang lebih luas.

Upaya penyamaan fasilitas menunjukkan kesadaran bahwa hak masuk sekolah belum cukup apabila sebagian peserta didik mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan. Meski demikian, istilah fasilitas yang sama perlu dibedakan dari layanan yang selalu seragam. Peserta didik dengan kebutuhan berbeda terkadang memerlukan bentuk dukungan yang berlainan untuk mencapai kesempatan belajar yang setara. Dalam penelitian ini belum terdapat inventaris fasilitas, data penggunaan oleh tiap kelompok murid, atau penilaian kepuasan pengguna. Oleh sebab itu, simpulan yang dapat diambil terbatas pada orientasi kebijakan yang dinyatakan informan, sementara tingkat pemerataan pemanfaatannya masih perlu diperiksa.

Kerja Sama Sekolah dengan Berbagai Pihak

Informan menyebutkan bahwa sekolah menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, kepolisian, berbagai lembaga, dan penyedia bimbingan belajar. Pihak-pihak tersebut melakukan kegiatan sosialisasi, termasuk penyampaian informasi mengenai pendidikan lanjutan. Sekolah memandang dukungan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama karena tidak dapat memenuhi semua kebutuhan peserta didik secara mandiri. Tiap mitra memberikan kontribusi yang berbeda: perguruan tinggi dan bimbingan belajar memperluas informasi mengenai kelanjutan studi, sementara kepolisian serta lembaga lain menghadirkan pengetahuan yang melengkapi pembelajaran di sekolah. Namun, kegiatan kemitraan yang disampaikan informan lebih banyak berupa sosialisasi, sehingga belum dapat dipastikan bahwa perencanaan program sepenuhnya berangkat dari kebutuhan murid yang mengalami hambatan terbesar.

Kemitraan berpotensi memperluas sumber informasi dan pengalaman peserta didik, khususnya ketika sekolah mempunyai keterbatasan sumber daya. Namun, jenis mitra saja tidak cukup untuk menjelaskan manfaat yang diterima murid. Penilaian atas kemitraan memerlukan kejelasan sasaran kegiatan, frekuensi pelaksanaan, keterlibatan peserta didik, serta tindak lanjut setelah sosialisasi. Semua unsur tersebut belum dijelaskan secara terperinci dalam wawancara. Oleh karena itu, kontribusi kemitraan dalam artikel ini ditempatkan sebagai salah satu strategi yang dilaporkan, bukan hasil yang telah diuji pengaruhnya terhadap keberlanjutan sekolah atau capaian pendidikan.

Evaluasi, Keberlanjutan, dan Harapan Sekolah

Informan menyatakan bahwa strategi sekolah tidak berhenti pada penerimaan peserta didik. Apabila terdapat murid yang mulai tidak aktif atau mengalami masalah kehadiran, sekolah terlebih dahulu menelusuri penyebabnya sebelum mengambil keputusan lanjutan. Sekolah juga menyatakan terbuka terhadap murid pindahan selama bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan latar belakang keluarga maupun status sosial. Strategi tersebut diharapkan berkelanjutan sehingga hambatan sosial dan ekonomi tidak mendorong peserta didik meninggalkan sekolah. Meski demikian, evaluasi yang digambarkan masih berupa penanganan kasus demi kasus, bukan pemantauan terukur dengan indikator kehadiran atau angka putus sekolah. Ketentuan kedisiplinan juga perlu diterapkan secara mempertimbangkan kondisi murid, misalnya keterlambatan yang dipengaruhi jarak perjalanan.

Penelusuran penyebab ketidakaktifan merupakan langkah awal yang relevan untuk menghindari keputusan disipliner tanpa mempertimbangkan konteks. Jika dikembangkan menjadi prosedur pemantauan, penelusuran tersebut dapat dibedakan ke dalam identifikasi masalah kehadiran, komunikasi dengan keluarga, penentuan dukungan yang memungkinkan, dan pengecekan kembali kondisi murid. Tahapan ini merupakan usulan analitis dari hasil penelitian, bukan catatan bahwa sekolah telah memiliki mekanisme formal dengan urutan demikian. Bukti administratif mengenai perubahan kehadiran dan kelanjutan studi dibutuhkan untuk mengetahui apakah penanganan kasus benar-benar mengurangi risiko putus sekolah.

Keterkaitan antara strategi, bentuk pelaksanaan, serta hambatan yang dituju diringkas dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan keterkaitan antartema strategi sekolah dalam memperluas kesempatan belajar

Tema	Bentuk strategi menurut informan	Hambatan yang dituju
Penerimaan murid	SPMB dengan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan khusus	Jarak, keterbatasan ekonomi, pengakuan prestasi
Dukungan ekonomi	Beasiswa dan bantuan (termasuk KIP/PIP bagi 359 siswa), disalurkan setelah ditelusuri	Biaya transportasi dan kebutuhan penunjang
Pendampingan belajar	Penelusuran sebab, workshop guru, pendekatan guru dan guru BK	Kesulitan belajar, metode mengajar kurang bervariasi
Fasilitas	Penyamaan fasilitas bagi seluruh murid	Kesenjangan setelah murid diterima
Kemitraan	Perguruan tinggi, kepolisian, lembaga lain, bimbingan belajar	Keterbatasan sumber dukungan di dalam sekolah
Evaluasi dan keberlanjutan	Penelusuran penyebab ketidakaktifan sebelum keputusan akhir	Risiko putus sekolah

Jika dibaca secara terpadu, keenam tema menunjukkan hubungan antara membuka pintu masuk pendidikan dan mempertahankan keterlibatan peserta didik setelahnya. Kebijakan penerimaan menjawab akses awal; bantuan ekonomi, pendampingan, dan fasilitas menyasar hambatan selama proses belajar; sedangkan kemitraan dan penelusuran ketidakaktifan dapat menjadi dukungan lintas pihak untuk keberlanjutan. Hubungan ini merupakan sintesis interpretatif terhadap hasil wawancara. Hasil penelitian belum memungkinkan penyusunan urutan prioritas antarkegiatan, pembandingan intensitas pelaksanaan, atau penetapan strategi paling efektif karena informasi tersebut tidak dikumpulkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat enam tema strategi SMAN 14 Makassar dalam memperluas kesempatan belajar: penerimaan murid melalui SPMB; beasiswa dan bantuan berdasarkan penelusuran kondisi keluarga; pendampingan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar disertai penguatan metode mengajar guru; penyamaan fasilitas; kemitraan dengan pihak luar; serta penelusuran penyebab ketidakaktifan untuk mencegah putus sekolah. Keenam tema saling melengkapi dan memperlihatkan bahwa pemerataan dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan hanya tahap penerimaan peserta didik (Ainscow, 2020).

Keterbatasan ekonomi masih menjadi tantangan, sehingga dukungan pihak lain, antara lain untuk kebutuhan transportasi, tetap dibutuhkan (Syakarofath et al., 2020). Sekolah disarankan mendokumentasikan

kriteria serta penerima bantuan secara sistematis, menghubungkan pelatihan guru dengan perubahan praktik pembelajaran, dan merancang kemitraan berdasarkan kebutuhan peserta didik.

Arah perbaikan yang dapat dirumuskan dari temuan ini ialah memastikan bahwa setiap bentuk dukungan mempunyai sasaran yang jelas dan dapat ditinjau kembali secara berkala. Misalnya, jalur penerimaan dapat didokumentasikan menurut kelompok sasaran, bantuan menurut kebutuhan dan penerima, serta pendampingan menurut jenis kendala dan tindak lanjut. Usulan tersebut dimaksudkan sebagai langkah penguatan evaluasi kelembagaan, bukan temuan tentang adanya kelemahan administratif tertentu yang telah dibuktikan melalui audit sekolah.

Penelitian ini dibatasi pada wawancara dengan satu informan di satu sekolah. Oleh karena itu, hasilnya merupakan gambaran kontekstual menurut perspektif pimpinan sekolah dan belum menunjukkan besaran dampak tiap strategi. Kajian selanjutnya dapat melibatkan guru, guru BK, orang tua, dan murid serta menganalisis data kehadiran, cakupan bantuan, dan angka putus sekolah untuk menilai keberhasilan program secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 6*(1), 7–16. https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587

Attar, H. (2025, March 3). Mendikdasmen umumkan perubahan PPDB jadi SPMB, zonasi diganti dengan jalur domisili. *NU Online*. https://pustaka.nu.or.id/nasional/mendikdasmen-umumkan-perubahan-ppdb-jadi-spmb-zonasi-diganti-dengan-jalur-domisili-RSkD8

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum, 41*(5), 545–547. https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547

Devitasari, R., Alifianto, R., Nurdin, S. F., Irawati, S., Syahida, S. I., & Susanti, M. M. I. (2025). Strategi pembelajaran guru pada peserta didik dengan beragam latar belakang sosial ekonomi di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, 12*(2), 474–486.

Fatah, A., Suhaili, M., & Farida, I. (2021). Analisis indikator pendidikan: Partisipasi pendidikan di Indonesia periode 1994–2018. *Jurnal Kependidikan, 7*(3), 555–564. https://doi.org/10.33394/jk.v7i3.3516

Harianti, L. N. S. (2024). Analisis kebijakan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan di SMAN 1 dan 2 Kota Blitar. *Foundasia, 15*(2), 27–37. https://doi.org/10.21831/foundasia.v15i2.77352

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (n.d.). *Profil sekolah SMAN 14 Makassar (NPSN 40311948).* Sekolah Kita.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods, 16*(1), 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Said, K., & Torro, S. (2020). Kontribusi kelas perahu dalam mengurangi angka putus sekolah di Pulau Salemo Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep. *Jurnal Sosialisasi, 7*(3), 25–30. https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i2.14793

Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 5*(2), 115–130. https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736

Ulvi, M. (2025). *Strategi lembaga pendidikan dalam meningkatkan jumlah peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kepahiang* [Skripsi sarjana, Institut Agama Islam Negeri Curup]. https://e-theses.iaincurup.ac.id/9149/